

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Angela, K., & Tanggung Gugat Risiko Majikan atas Perbuatan Melanggar Hukum Bawahannya, K. (2022). TANGGUNG GUGAT RISIKO MAJIKAN ATAS PERBUATAN MELANGGAR HUKUM BAWAHANNYA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH TRUK TRONTON DI BALIKPAPAN: SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG GUGAT DAN BAGAIMANA BENTUK GANTI KERUGIANNYA? RISK LIABILITY AN EMPLOYER OF UNLAWFUL ACTS BY HIS EMPLOYEE IN THE ACCIDENT BY TRONTON TRUCK IN BALIKPAPAN: WHO IS LIABLE AND HOW THE COMPENSATION FORMS? Citation Structure Recommendation. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 3, Issue 4). Bulan Keempat. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Balik, A., & Uktolseja, N. (2021). Aspek Keadilan dalam Perjanjian Kerja Outsourcing di Tengah Pandemi Covid-19. *SASI*, 27(2), 221. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.452>
- Berdasarkan, A., Pollution, L. S., & Kunci, K. (2015). *DI BEBERAPA NEGARA ( INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE ON LAND – BASED SOURCES POLLUTION AND TREATMENT PRACTICES IN SEVERAL COUNTRIES )* Loura Hardjaloka Fakultas Hukum Universitas Indonesia Menara Prima Lt . 18 , Jl . DR . Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6 . 2 . 1–30.
- Campuran, P., Berstatus, D. A. N., & Kerja, T. (2019). *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1 Maret 2019* 109. 10(1), 109–122.
- Dameria, R., Busro, A., & Hendrawati, D. (2017). PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKAN MEDIS DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 352/PK/PDT/2010). In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 6, Issue 1).

- Do, J., & Amaral, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3). In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 1).  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Dyani, V. A., & Kenotariatan, M. (2017). *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte* (Vol. 2, Issue 1).
- Enceng, Irianto, liestyodono b, & Purwaningdyah. (2014). Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 1–35.  
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/904>
- Husin, Z. (2021a). Outsourcing sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 1.  
<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>
- Husin, Z. (2021b). Outsourcing sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 1.  
<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>
- Ketenagakerjaan, D. I. B. (2016). 1 . *Latar Belakang Permasalahan Perempuan mempunyai atas perlindungan yang khusus sesuai dengan fungsi reproduksinya sebagaimana diatur pada pasal 11 ayat ( 1 ) CEDAW huruf f bahwa hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk usaha perli. 1, 4397–4424.*
- Komang, N., Permata, H., Asvatham, D., Putri, S., & Purwani, M. E. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TENAGA MEDIS APABILA MELAKUKAN MALAPRAKTIK MEDIS. In *Jurnal Kertha Semaya* (Vol. 8).
- Laurensius, A. S. (2017). Perkembangan dan dinamika hukum ketenagakerjaan di indonesia. *Jurnal Sehat*, 5(1), 2354–8649.
- Magee, R. v., م. سلامة, Magee, R. v., Crowder, R., Winters, D. E., Beerbower, E., Bodhi, B., Schindler, S., Pfattheicher, S., Reinhard, M.-A., Haddock, G., Foad, C., Windsor-Shellard, B., Dummel, S., Adarves-Yorno, I., Furlotte, C.,

- & Gorski, P. C. (2017). No Title الاجراءات الجنائية. *ABA Journal*, 102(4), 24–25.  
<https://doi.org/10.1002/ejsp.2570>
- Magister, J., Jawab, T., Alih, P., Terhadap, D., Outsourcing, P., Terkena, Y., Hubungan, P., Dimasa, K., Covid, P., Hutabarat, I. M., Anggusti, M., & Tobing, C. N. M. (n.d.). *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO) TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ALIH DAYA TERHADAP PEKERJA OUTSOURCHING YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIMASA PANDEMI COVID-19 (STUDI DOKUMEN PERJANJIAN PENYEDIA JASA DI PT NTU)*. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Muhammad, A. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 105/107. <http://ojs.unm.ac.id/index.php/supremasi/article/view/2800>
- Muhammadiyah, M. (2017). PARTISIPASI PUBLIK SEBAGAI STRATEGI MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE OTONOMI DAERAH. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i1.61>
- Nelson Panjaitan Pembimbing, J., Bachtiar, M., Dasrol, Mk., Alamat, M., Sekuntum, J., Sekuntum Permai No, P., Delima, K., & Tampan, K. (2014). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEKERJA. In *JOM Fakultas Hukum* (Vol. 1).
- Nursalim, C. R. P., & Suryono, L. J. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing. *Media of Law and Sharia*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/mls.v2i1.11478>
- Pada, J., Bina, D., Dan, M., & Samarinda, K. (2014). *eJournal Ilmu Pemerintahan*. 2(3), 2605–2615.

- Pemutusan, D. A. N., & Kerja, H. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KERJA DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi di PT. Makmur Sejahtera Wisesa)*.
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA (STUDI KASUS : PT. BALI DANA SEJAHTERA DENPASAR)*. (n.d.).
- Perusahaan Atas Perbuatan, T., Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan, T., & Arief Akbar Surahman, M. (2021). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)"*. 2(3), 613–623.  
<http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>
- peter mahmud marzuki*. (n.d.).
- Pria Alwadipa, B. (n.d.). *Jurnal Islamic Circle SISTEM OUTSOURCING DI SUMATERA BARAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ETIKA BISNIS ISLAM*.
- Rhiti, H. (n.d.). *LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF*.
- Rifqi Noval, S. M. (2022). EVOLUSI HAK PEKERJA DI ERA DIGITAL: PRAWACANA RIGHT TO DISCONNECT DI INDONESIA. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 234–253. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.637>
- Saraswati, A. L. (2020). Tanggung Jawab Perusahaan Atas Kecelakaan Kerja Pekerja Outsourcing Yang Tidak Didaftarkan Bpjs Ketenagakerjaan. *Jurist-Diction*, 3(4), 1199. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20202>
- Sari, I. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata* (Vol. 11, Issue 1).
- Simanjuntak, E. (2019). RESTATEMENT ON JUDICIAL JURISDICTION IN ADMINISTRATIVE TORT. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(2), 165–190.  
<https://doi.org/10.25216/peratun.222019.165-190>
- suwignjo, aditya, H. (2019). *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15/No. 1/April 2018. 16(1), 89–111.

Triani, K. W., & Ariana, I. G. P. (2014). Perlindungan hukum terhadap pekerja paruh waktu apabila terjadi kecelakaan kerja. *Kertha Semaya*, 01(11), 1–5.

Wahyuni, D., & Outsourcing, P. P. (n.d.). *NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN*. <http://blog.analisisinsure.com/?p=287>,

Yohanitas, W. A. (2017). Menciptakan Good Governance Melalui Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Jurnal Borneo Administrator*, 12(3), 239–257. <https://doi.org/10.24258/jba.v12i3.253>

Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (n.d.-a). *TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OUTSOURCING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM BERBAGAI ASPEK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA* *Gorontalo Law Review*.

Yuliardi, A. D., & Santoso, I. B. (n.d.-b). *TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN OUTSOURCING TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM BERBAGAI ASPEK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA* *Gorontalo Law Review*.

## **Peraturan Perundang-undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. UU No 13 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja